

**REKRUTMEN POLITIK CALEG PEREMPUAN DALAM MEMENUHI KUOTA
30% DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI DIY TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Dipenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**



Disusun Oleh :

Rubiyati

20150520249

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

NASKAH PUBLIKASI

**REKRUTMEN POLITIK CALEG PEREMPUAN DALAM MEMENUHI
KUOTA 30% DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI DIY
TAHUN 2019**

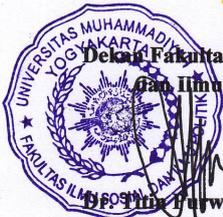
Oleh:
Rubiyati
20150520249

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.
NIK: 19690822199603 163 038

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Laenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

Rekrutmen Politik Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kuota 30% Di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DIY Tahun 2019

Rubiyati

Rubiyati.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30% di PKS Provinsi DIY Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan proses rekrutmen menggunakan teori *supply* dan *demand*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik. Dalam proses rekrutmen *supply* yang didalamnya terdapat latar belakang sosial, sumber daya, dan motivasi itu macamnya bervariasi dari setiap caleg. Dalam proses rekrutmen *demand* yang didalamnya terdapat mekanisme rekrutmen, pola rekrutmen, dan kebijakan partai PKS. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik seperti faktor yang mendukung dan menghambat perempuan dalam berpolitik.

PENDAHULUAN

Fenomena caleg perempuan dapat dikatakan semakin meningkat, yang terdapat pada jabatan politik di lembaga legislatif (DPRD/DPR/DPD) maupun dalam jabatan eksekutif sebagai Kepala Daerah. Perempuan menginginkan tersedianya ruang untuk mereka menyuarakan hak-haknya untuk berpendapat ataupun hak untuk menyampaikan kepentingan perempuan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Semua partai diharuskan dapat memenuhi kuota 30% tersebut.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam kajian rekrutmen caleg perempuan yang sebagian besarnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik. Penelitian yang dilakukan oleh Djuwanti Hud (2008) mengenai analisis rekrutmen caleg perempuan maupun Susi Susanti (2012) dan Pradita Tyas Putri Anadari (2014) mengenai pola rekrutmen caleg perempuan pada PKS. Hasil penelitian Djuwanti Hud menunjukkan faktor yang mendukung dan menghambat proses rekrutmen adalah dari faktor internal dan faktor eksternal.

Cholida Eka Anggraini (2014) juga melakukan penelitian tentang analisis komparatif rekrutmen perempuan dalam partai PDIP dan PKS di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan program yang dilakukan PDIP dan PKS memiliki perbedaan, selain itu dalam proses rekrutmen PDIP melakukan penilaian, survey dan riset kelayakan tiap calon yang diajukan oleh masyarakat sedangkan untuk PKS menggunakan pemilihan umum internal kader disetiap daerah pemilihan untuk menentukan caleg.

Artikel ini mengkaji tentang proses rekrutmen politik caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30% di PKS Provinsi DIY pada tahun 2019. Faktor yang dimaksud adalah proses rekrutmen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg PKS. Tidak hanya itu, artikel ini menganalisis proses rekrutmen menggunakan model *supply* dan *demand*. Model *supply* akan dianalisis dari latar belakang sosial (kelas pekerjaan, pendidikan, usia, dan status pernikahan), sumber daya (waktu, keuangan, pengalaman politik, dan jaringan pendukung), motivasi (ambisi dan dorongan). Model *demand* akan dianalisis dari mekanisme rekrutmen, pola rekrutmen caleg perempuan dan kebijakan partai.

Ada beberapa alasan ketika penulis mengambil kasus di PKS DIY. Pertama, dilihat dari jumlah persentase caleg perempuan PKS di DIY pada tahun 2019 melebihi kuota 30% yaitu sebesar 37,50%. Kedua, partai PKS merupakan partai dakwah namun sangat mendukung keterwakilan perempuan dalam politik. Ketiga, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil bagi perempuan dan laki-laki.

KERANGKA TEORITIS

Partai politik adalah sekumpulan orang yang tersusun secara rapi yang dipersatukan dengan adanya persamaan ideologi yang bertujuan untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan di dalam pemilihan umum yang berguna untuk mewujudkan alternative kebijakan yang telah disusun (Surbakti, 1992: 116). Partai politik adalah suatu kelompok anggota yang bersifat terbuka yang dimana berfokus dengan spektrum sosial-sosial kebijakan (Suryadi, 2005: 57).

Pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti adalah suatu pemilihan atau seleksi serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan sejumlah kepentingan dalam sistem politik yang pada umumnya di pemerintahan yang pada khususnya terhadap orang-orang yang mempunyai bakat yang lebih menonjol dan tugas partai politik untuk menyeleksi dan menempatkannya sebagai calon pemimpin (Surbakti, 1992: 118). Menurut Rush dan Althoff (Tangkilisan, 2003: 188) sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara. Pertama, rekrutmen terbuka yaitu memberikan dan menyediakan kesempatan yang adil dan sama bagi seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung ataupun bersaing dalam proses penyeleksian yang diadakan. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu kesempatan untuk ikut berpartisipasi atau masuk menduduki jabatan politik tidaklah berlaku sama bagi setiap warga negara yang artinya kesempatan ini hanya diberikan kepada individu-individu tertentu yang bisa mendapatkan kursi di dalam jabatan politik.

Supply and demand model of recruitment (Norris and Lovenduski, 1993: 378). Dalam model rekrutmen *supply* ini ada berbagai aspek yang akan dibahas yaitu dimulai dari latar

belakang masalah, sumber daya, dan motivasi. Yang dimana dari berbagai aspek didalamnya terdapat pokok bahasan sendiri-sendiri. Dalam model rekrutmen *demand* akan ada beberapa aspek yang akan dibahas dari mekanisme rekrutmen, pola rekrutmen, dan kebijakan partai.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian studi kasus yang berada di Provinsi DIY khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan mengenai riwayat hidup caleg, KPU, maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada pengurus internal PKS terkait riwayat hidup caleg, proses rekrutmen caleg, pengalaman politik, faktor yang menghambat dan mendukung perempuan dalam politik. Selanjutnya wawancara dengan salah satu caleg perempuan PKS mengenai proses rekrutmen dan motivasi caleg perempuan. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan didukung dengan data dokumentasi dari website KPU.

TEMUAN DAN ANALISIS

1. Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera untuk Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% di Lembaga Legislatif

Tabel 1.1 Daftar Setiap Dapil PKS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| Dapil | Laki-laki | | Perempuan | | Jumlah tiap Dapil | % |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | | |
| D.I Yogyakarta 1 | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 100 |
| D.I Yogyakarta 2 | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 100 |
| D.I Yogyakarta 3 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 100 |
| D.I Yogyakarta 4 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 7 | 100 |
| D.I Yogyakarta 5 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 100 |
| D.I Yogyakarta 6 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100 |
| D.I Yogyakarta 7 | 7 | 63,64 | 4 | 36,36 | 11 | 100 |
| Total Seluruh Dapil | 33 | 60 | 22 | 40 | 55 | 100 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Setiap Dapil sudah menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan. Bahkan setiap Dapil justru lebih dari 30%, angka keterwakilan paling tinggi berada pada Dapil D.I Yogyakarta 4 yaitu sebesar 57,14%, sedangkan untuk angka yang paling rendah berada pada Dapil D.I Yogyakarta 3 dan D.I Yogyakarta 5 yaitu sebesar 33,33. Namun secara keseluruhan PKS dalam setiap Dapil sudah menerapkan kuota 30% dan bahkan lebih.

Berdasarkan data tersebut PKS justru melebihi kuota yang ditetapkan yaitu PKS DIY dapat mencalonkan caleg perempuan sebesar 40%. Persentase ini bisa dikatakan tinggi karena sudah mendekati setengah dari jumlah caleg keseluruhan. Sedangkan persentase untuk caleg laki-laki adalah 60%. Perbedaan yang tidak terlalu jauh karena hanya berbeda 10% antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan. Selain itu posisi nomor urut caleg perempuan juga tidak ditempatkan dibawah namun posisi nomor urut dibagi secara rata dengan caleg laki-laki.

Menurut salah seorang pengurus di DPW PKS DIY yaitu Sri Yatmi, S.Pd, M.Pd menyatakan bahwa PKS sangat mendukung adanya aturan 30% keterwakilan perempuan dalam politik:

“Ya kalau memang dari ketentuan pemerintah itu dari KPU ada ketentuan 30% caleg perempuan itu dari PKS sendiri memang ini ya sangat mendukung. Makanya dari internal dari PKS sendiri itu memotivasi dan menyiapkan kadernya terutama kader perempuan. Kader perempuan itu untuk bisa berperan untuk menjadi caleg PKS. Kami sudah menyiapkan persiapan dari PKS terutama kader perempuan yang punya kompetensi disana kita tampilkan dan ini ada kesempatan.”

-Supply :

a. Latar belakang sosial : kelas pekerjaan, pendidikan, usia, status pernikahan.

Di dalam latar belakang sosial dalam teori rekrutmen terdapat empat aspek. Empat aspek tersebut yaitu kelas pekerjaan, pendidikan, usia, dan status pernikahan. Penulis akan membahas satu persatu dari ke empat aspek ini.

Tabel 1.2 Berdasar Latar Belakang Kelas Pekerjaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| Pekerjaan | Laki-Laki | | Perempuan | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Swasta | 18 | 32,73 | 12 | 21,82 |
| Wiraswasta | 2 | 3,64 | 3 | 5,45 |
| Pelajar/Mahasiswa | - | - | 1 | 1,82 |
| Guru | - | - | 2 | 3,64 |
| Guru Swasta | - | - | 1 | 1,82 |
| Anggota DPRD Provinsi 2014-2019 | 3 | 5,45 | - | - |
| Anggota DPRD Kabupaten Kota 2014-2019 | 9 | 16,36 | 1 | 1,82 |
| Ibu Rumah Tangga | - | - | 1 | 1,82 |
| Petani | 1 | 1,82 | - | - |
| Tidak Bekerja | - | - | 1 | 1,82 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dalam latar belakang sosial dengan aspek pekerjaan itu sangat bervariasi. Melihat data dari KPU bisa dilihat ada berbagai aspek pekerjaan dari caleg laki-laki dan caleg perempuan. Dari tabel tersebut menunjukkan untuk pekerjaan swasta dan wiraswasta antara caleg laki-laki dan caleg perempuan itu jumlahnya paling besar daripada pekerjaan yang lain. Perempuan banyak yang berasal dari seorang guru, kemudian tidak ada caleg perempuan yang *incumbent*, ini membuktikan bahwa caleg perempuan kurang pengalaman daripada caleg laki-laki. Caleg laki-laki yang sudah dari latar belakang politisi atau anggota DPRD adalah 21,81% dan ternyata untuk caleg perempuan hanya 1,82%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PKS DIY dalam proses rekrutmen caleg untuk kelas pekerjaan itu bervariasi. Dimana proses rekrutmen berlaku adil tanpa membedakan kelas pekerjaan.

Tabel 1.3 Berdasar Tingkat Pendidikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| Pendidikan | Laki-Laki | | Perempuan | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| SMA/Sederajat | 8 | 14,55 | 7 | 12,73 |
| D3 | 1 | 1,82 | 2 | 3,64 |
| D4/S1 | 18 | 32,73 | 11 | 20 |
| S2 | 6 | 10,91 | 2 | 3,63 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dalam latar belakang sosial dengan aspek pendidikan itu sangat bervariasi. Melihat data dari KPU bisa dilihat ada berbagai pendidikan dari caleg laki-laki dan caleg perempuan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah caleg yang pendidikannya D3, SMA/Sederajat itu hampir sama antara caleg laki-laki dan caleg perempuan itu sekitar 16,37%. Hanya saja untuk yang jenjang pendidikan S2 dan D4/S1 itu lebih banyak caleg laki-laki daripada perempuan yaitu 43,64% untuk caleg laki-laki dan 23,63 untuk caleg perempuan. Artinya jenjang pendidikan disini caleg perempuan masih dibawah caleg laki-laki. Disini posisi caleg perempuan belum bisa sejajar dengan caleg laki-laki dari segi kualitas pendidikan. Namun secara keseluruhan untuk kualitas tingkat pendidikan caleg laki-laki dan caleg perempuan sudah baik.

Tabel 1.4 Berdasar Usia Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| Usia | Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 - 40 tahun | 4 | 7,27 | 7 | 12,73 | 11 |
| 41 – 50 tahun | 19 | 34,55 | 11 | 20 | 30 |
| 51 – 60 tahun | 10 | 18,18 | 4 | 7,27 | 14 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 | 55 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dilihat dalam latar belakang sosial dengan aspek usia itu ternyata untuk usia para caleg itu bervariasi. Usia tersebut dimulai dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Jumlah caleg laki-laki dilihat dari usia yang muda jumlahnya lebih sedikit daripada caleg perempuan. Sedangkan untuk usia matang lebih banyak caleg laki-laki karena caleg perempuan hanya 20% caleg laki-laki 34,55%. Begitu juga usia yang sudah tua jumlah caleg laki-laki lebih banyak daripada caleg perempuan. Artinya caleg perempuan disini usianya lebih banyak yang muda daripada caleg laki-laki. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PKS DIY dalam proses rekrutmen caleg terhadap aspek usia caleg itu bersifat adil tanpa membeda-bedakan usia muda ataupun usia yang sudah tua.

Tabel 1.5 Berdasar Status Pernikahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| Status Pernikahan | Laki-Laki | | Perempuan | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Belum menikah | - | - | 1 | 1,82 |
| Sudah menikah | 33 | 60 | 21 | 38,18 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dilihat dalam latar belakang sosial dengan aspek status pernikahan itu ternyata status pernikahan untuk para caleg itu bervariasi, serta tidak harus yang sudah menikah namun untuk yang belum menikah juga diperbolehkan untuk menjadi caleg. Melihat data dari KPU bisa dilihat bahwasannya mayoritas caleg PKS sudah menikah, hanya ada 1 caleg perempuan yang belum menikah. Dengan begitu dapat disimpulkan dimana proses rekrutmen berlaku adil tanpa membeda-bedakan status pernikahan.

Selain berdasarkan data yang ada di KPU, terdapat pula data wawancara dengan salah satu pengurus di DPW PKS DIY dan merupakan caleg laki-laki juga yang akan maju di pemilu tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa PKS DIY dalam merekrut caleg perempuan tidak ada pengaruhnya terhadap aspek kelas pekerjaan, pendidikan, usia dan status pernikahan. Semua berlaku adil tanpa membeda-

bedakan aspek tersebut. Dalam peraturan UU untuk masalah usia sudah ada batasannya.

“..Kalau usia sudah ada didalam UU itu dibatasi. Kalau pendidikan tidak ada. Semua program studi itu bisa. Ras jelas tidak lah. Kelas pekerjaan tidak, dari temen-teman yang latar belakang buruh itu ada. Contoh: Caleg Provinsi DIY itu buruh dia pekerja dari sebuah perusahaan. Kemudian kita rekrut menjadi caleg itu ada yang namanya Ngatino. Walaupun pekerja nya buruh dia sangat aktif di desanya bahkan dia menjadi anggota BPD..”

b. Sumber daya : waktu, keuangan, pengalaman politik, jaringan pendukung.

Di dalam sumber daya pada teori rekrutmen permintaan dan penawaran ada empat aspek. Empat aspek ini yaitu waktu, keuangan, pengalaman politik, dan jaringan pendukung.

Tabel 1.6 Caleg PKS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Berdasarkan Pengalaman Politik

| Pengalaman Politik | Laki-Laki | % | Perempuan | % | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|
| Anggota Legislatif 2014-2019 | 10 | 18,18 | 1 | 1,82 | 11 |
| Menjadi Caleg PKS 2014 | 5 | 9,09 | 7 | 12,73 | 12 |
| Menjadi Pengurus Partai | 7 | 12,73 | 5 | 9,09 | 12 |
| Belum memiliki pengalaman politik | 11 | 20 | 9 | 16,36 | 20 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 | 55 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi anggota legislatif laki-laki itu jumlahnya 18,18% yang perempuan hanya 1,82%, jumlah perempuan hanya 1 berbanding 10 nya laki-laki. Sedangkan untuk yang sudah menjadi caleg pada tahun 2014 itu lebih banyak perempuan ternyata perempuan sudah banyak menjadi caleg tetapi tidak terpilih. Menjadi pengurus partai itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan dan belum memiliki pengalaman politik laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan. Namun secara keseluruhan caleg laki-laki sudah lebih banyak memiliki pengalaman politik daripada caleg perempuan.

Dalam latar belakang sosial untuk rekrutmen caleg perempuan PKS di DPW PKS DIY untuk masalah waktu, keuangan, pengalaman, jaringan pendukung itu macamnya bervariasi. Dari data KPU bisa dilihat bahwasannya caleg laki-laki dan caleg perempuan yang sudah memiliki pengalaman politik. Pengalaman politik itu

yaitu mereka pernah menjadi caleg DPRD DIY pada tahun 2014. Namun tidak ada perbedaan untuk proses caleg laki-laki dan caleg perempuan yang sudah memiliki pengalaman politik ataupun yang sama sekali belum memiliki pengalaman politik.

Sedangkan untuk aspek waktu juga tidak ada hubungan sama sekali. Dari data KPU terlihat berbagai kegiatan pekerjaan yang ada pada caleg perempuan. Dengan begitu untuk aspek waktu tidak ada hubungan sama sekali karena itu hanya tergantung dari para caleg perempuan untuk membagi waktunya. Membagi waktu di dunia politik dan waktu di keluarga bagi yang sudah menikah.

Untuk aspek jaringan pendukung juga tidak ada hubungan terhadap proses rekrutmen caleg perempuan. Caleg yang sudah punya pendukung seperti petahana juga diberikan kesempatan yang sama. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan juga tidak ada hubungan untuk proses rekrutmen caleg perempuan. Selain data yang ada di KPU, menurut dari paparan hasil wawancara dengan salah satu pengurus di DPW PKS DIY bahwasannya aspek jaringan pendukung, waktu, keuangan, pengalaman politik tidak ada pengaruhnya terhadap proses rekrutmen caleg perempuan

b. Motivasi : ambisi, dorongan

Dalam motivasi di teori rekrutmen dengan sistem permintaan dan penawaran terdapat aspek ambisi dan dorongan. Dimana para caleg memiliki motivasi yang bermacam-macam.

Tabel 1.7 Caleg PKS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Berdasarkan Motivasi

| Motivasi | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beribadah dan Dakwah | 6 | 10,91 | 4 | 7,27 |
| Berkontribusi Membangun Negara | 14 | 25,45 | 7 | 12,73 |
| Tidak mencantumkan motivasi | 13 | 23,64 | 11 | 20 |
| Total | 33 | 60 | 22 | 40 |

Sumber: diolah dari data kpu.go.id

Dari tabel menunjukkan bahwa terlihat berbagai macam motivasi yang ada pada caleg PKS ketika memutuskan untuk menjadi caleg DPRD DIY. Motivasinya bersifat normatif tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi anggota legislatif. Tetapi ada pula yang tidak mencantumkan motivasi mereka menjadi caleg.

Motivasi perempuan ketika memutuskan untuk masuk aktif di dunia politik dan menjadi caleg perempuan tentunya karena ada ambisi dan dorongan dari diri sendiri ataupun dari faktor lain. Seperti halnya dengan ambisi yang ada pada salah satu caleg PKS DIY yang mempunyai tekad yaitu beribadah dan dakwah. Beliau mempunyai tekad tersebut karena melihat kondisi negara ini yang sangat membutuhkan peran perempuan:

“..Kalau di PKS itu partai yang tidak hanya berpartai dalam politik ya. Partai PKS itu bisa dikatakan partai dakwah. Kesempatan berdakwah itu kan berbagai bidang. Sementara saat ini memang kita itu melihat kondisi negara yang seperti ini sudah saatnya kita ikut berperan. Para perempuan ikut berpartisipasi, kalau kita tidak masuk dalam politik otomatis kita nanti tidak bisa memberikan kontribusi yang kaitannya dengan Undang-Undang dengan peraturan. Karena disitu motivasi kami adalah satu beribadah dan dakwah..”

Salah satu motivasi yang paling besar bagi caleg perempuan ketika menjadi caleg perempuan adalah beribadah. Selain itu juga ingin meningkatkan akan peran perempuan agar bisa memberikan kontribusi yang berguna bagi perempuan.

-Demand :

a. Tahap rekrutmen caleg perempuan PKS DIY

Proses pertama adalah proses penjaringan. Penjaringan nanti semua jenjang struktural punya hak untuk mengusulkan. Disamping itu PKS juga memberikan hak kepada para kader untuk mencalonkan nama. Jadi tidak hanya struktural tetapi bahkan kaderpun boleh mengusulkan nama. Calon yang diusulkan itu bisa: Pertama, dari kader internal yaitu kader yang sudah mengikuti pembinaan-pembinaan dan pengkaderan. Kedua, dari eksternal yaitu orang yang diluar PKS yang belum mengikuti pengkaderan dan belum menjadi anggota PKS.

Kemudian setelah proses penjaringan administratif itu selesai mereka dengan syarat-syarat itu ditentukan telah memenuhi syarat lalu masuk proses penyaringan. Proses penyaringan itu tidak hanya administratif, jadi sudah ada proses cek dan kroscek. Kemudian proses penyaringan ada dua tahap. Penyaringan tahap ke dua adalah para calon-calon ini diterjunkan didalam lapangan. Disitulah ada uji publik disitu bisa menilai bawah sekalipun bisa menilai.

b. Pola rekrutmen

Partai PKS khususnya di DPW DIY menerapkan pola rekrutmen yang sifatnya terbuka. Yang artinya caleg perempuan disini tidak hanya berasal dari internal PKS namun bisa berasal dari eksternal PKS. Caleg laki-laki ataupun caleg perempuan tidak bisa mengusulkan dirinya sendiri namun mereka bisa menjadi caleg ketika diusulkan oleh DPRa, DPC, DPD, DPW ataupun usulan dari para kader yang lain.

c. Kebijakan Partai

1. Berdasarkan Nomor Urut Caleg PKS

Tabel 1.8 Daftar Setiap Dapil Berdasar Nomor Urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

| No. Urut | Dapil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | Jumlah | | | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | % | P | % |
| 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 | 3 | 5,45 |
| 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14,55 | 6 | 10,91 |
| > 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 25,45 | 13 | 23,64 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 60 | 22 | 40 |

Sumber: diolah dari data KPU.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi penempatan caleg dalam nomor urut dilakukan secara acak dan adil tanpa membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan. Ini membuktikan bahwa caleg perempuan tidak hanya dimasukkan dalam nomor urut bawah. Walaupun persentase untuk nomor urut caleg 1-2 paling besar diduduki oleh caleg laki-laki dengan persentase 20% sedangkan untuk caleg perempuan sebesar 5,45% dari keseluruhan dapil. Perbedaan yang cukup jauh, namun setidaknya caleg perempuan tidak hanya ditempatkan di nomor urut lebih dari 4.

2. Upaya peningkatan peranan perempuan oleh Partai Politik

Upaya PKS dalam memberikan peranan kepada perempuan yang ada dalam kepengurusan partai yaitu dengan melibatkan mereka disetiap bidang-bidang yang ada di PKS. Kader perempuan PKS tidak hanya aktif di bidang khusus perempuan namun mereka dilibatkan diseluruh bidang yang ada di PKS. Sebagai contoh di bidang ekonomi, bidang politik itu ada perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Arif bahwasannya:

“..Pertama kita punya bidang yang secara khusus itu mengurus persoalan dunia perempuan. Nah disamping itu masing-masing bidang apapun tidak hanya bidang perempuan di dalamnya. Misalnya bidang ekonomi nanti ada kader perempuan, bidang politik nanti disitu ada kader perempuan. Jadi semua bidang-bidang itu disitu keterlibatan kader perempuan PKS itu ada..”

3. Peranan PKS dalam mendukung caleg perempuan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif

Peranan yang dilakukan PKS adalah memfasilitasi supaya kader-kader perempuan itu gerakannya masif dalam sosialisasi ke masyarakat, dari PKS memfasilitasi untuk: *Pertama*, mendampingi setiap caleg itu, setiap caleg itu didampingi oleh relawan sehingga mereka diharapkan bisa lebih masif. *Kedua*, didampingi kalau relawan membantu secara teknis dari sosialisasi, kampanye di masyarakat dan sebagainya. Mereka juga akan dipandu oleh manager dapil. Manager dapil ini akan memandu mendampingi lalu mempertemukan untuk saling membantu saat sosialisasi dengan calon anggota dewan juga dari tingkatan yang atasnya. Misalnya seorang caleg perempuan caleg kabupaten mereka ini kemudian oleh manager dapil dipertemukan dengan caleg dari tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ketika mereka sosialisasi itu bareng bertiga antara caleg pusat, caleg provinsi dan caleg kabupaten ini difasilitasi didampingi oleh manager dapil.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 di Provinsi DIY

a. Faktor yang mendukung dan menghambat keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg PKS:

Dalam proses rekrutmen caleg perempuan pada faktanya tidak mulus seperti yang dibayangkan. Banyak persolan disetiap partai untuk proses rekrutmen caleg perempuan. Tentunya disetiap partai memiliki cara tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti halnya kendala dalam proses rekrutmen caleg perempuan PKS, yang dimana kendala tersebut seperti pilihan jumlah perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

“..Rekrutmen untuk menjadi caleg perempuan ya kadang-kadang ada kendala. Artinya: dibandingkan kita merekrut caleg laki-laki itu jauh lebih mudah, pilihannya itu lebih banyak. Untuk menjadi caleg perempuan ya lebih sedikitlah pilihannya dan itu saya melihat dari seluruh partai. Tidak mudah memenuhi kuota 30% itu kita lihat. Tetapi kalau PKS bisa melebihi..”

PKS dalam proses rekrutmen terkadang juga mengalami kendala. Kendala tersebut berupa jumlah perempuan yang ingin menjadi caleg perempuan itu masih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan masih kurang percaya diri untuk menjadi caleg perempuan. Disinilah peran penting PKS dalam meyakinkan para kader perempuan untuk menjadi caleg perempuan. Tetapi, PKS tidak mengalami kendala tersebut dikarenakan jumlah keterwakilan perempuan PKS justru lebih dari 30%.

Selain dari segi jumlah juga ada kendala lain yang dihadapi oleh PKS dalam proses rekrutmen caleg perempuan. Kendala tersebut yaitu bagi perempuan yang sudah memiliki suami. Tentunya ketika dia diajukan untuk menjadi caleg perempuan harus ada ijin terlebih dahulu dari suaminya. Dan itu semua belum tentu para suami langsung memberikan ijin, banyak kasus ketika perempuan sudah mau untuk menjadi caleg tetapi tidak diijinkan oleh suami. Dengan begitu perempuan tersebut gagal untuk menjadi caleg perempuan. Sesuai dengan pernyataan dari:

“..Kalau seorang laki-laki itu kan tidak harus dia itu ijin dengan istri misalnya. Kalau perempuan mau tidak mau harus ijin dengan suami. Ijin diperbolehkan apa tidak. Sebenarnya dia sudah mau tetapi tidak diijinkan oleh suami. Karena yang terjadi seperti itu. Ini salah satu kendala ketika kita ingin merekrut caleg dari anggota perempuan harus dengan seijin suami..”

Kendala lain yang dihadapi PKS dalam meningkatkan jumlah caleg perempuan adalah dukungan keluarga. Yang artinya ketika perempuan itu tertarik

dan mau untuk menjadi caleg perempuan namun suaminya tidak memberikan izin itu otomatis perempuan tidak bisa lanjut untuk menjadi caleg perempuan.

Faktor yang mendukung keterwakilan perempuan di politik:

Pertama, internal dari caleg perempuan PKS yaitu keluarga. Ketika keluarga itu mendukung maka para kader dipastikan mau untuk menjadi caleg perempuan. Seperti pernyataan dari Sriyatmi:

“..Karena dukungan dari suami, anak itu sangat luar biasa. Anak saya yang pertama kali mendukung. Kalau dari keluarga tidak ada kendala, justru mereka yang mendukung saya untuk menjadi calon legislatif..”

Salah satu faktor yang paling penting dalam peningkatan keterwakilan perempuan di politik adalah dukungan keluarga. Ketika keluarga memberikan dukungan maka perempuan bisa dipastikan mau untuk menjadi caleg perempuan.

Kedua adalah agama, karena motivasi para caleg perempuan ikut aktif dalam politik yaitu ibadah dan dakwah. Seperti yang telah dinyatakan oleh Sriyatmi:

“..Kalau di PKS motivasi kami adalah satu ibadah dan dakwah. Karena prinsip kami sesuai dengan ayat menjadi pegangan kami. Menjadi orang bertakwa insyallah disitu sudah dijamin Allah. Jadi motivasi kami berpolitik khususnya di PKS bukan karena masalah pekerjaan atau masalah pendapatan..”

Mayoritas ketika para kader perempuan menjadi caleg perempuan, motivasi utamanya adalah beribadah. Yang dicari dari para caleg perempuan adalah ridho Allah. Untuk masalah pekerjaan atau pendapatan itu berada pada nomor sekian. Paling utama adalah ibadah dan dakwah.

Faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di politik:

Pertama, Faktor individu dari perempuan. Tidak semua kader perempuan itu punya minat di bidang politik, dalam bidang politik, dalam bidang politik praktis ya menjadi seorang calon anggota dewan itu tidak banyak yang punya minat. Sehingga dengan sedikit keterbatasan itu maka PKS sendiri ketika mencoba memenuhi keputusan itu harus betul-betul kerja keras artinya kita harus membujuk. Ketika kita lihat dia punya kompetensi besar, sudah punya aktivitas di masyarakat bagus, ini kemudian kita harus membujuk supaya dia mau menjadi anggota calon legislatif seperti itu.

Kedua, Faktor budaya. Budaya masyarakat masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Sehingga keterpilihan perempuan masih dibawah laki-laki. Budaya di masyarakat yang masih kurang percaya terhadap kemampuan perempuan. Kepercayaan dimasyarakat yang masih menganggap remeh seorang perempuan. Dengan keadaan tersebut membuat representasi keterwakilan perempuan masih sangat sedikit.

b. Kualitas kandidat : pendidikan, pelatihan, pengalaman politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg PKS di DIY tentang kualitas kandidat yang didalamnya ada pendidikan, pelatihan, pengalaman politik itu tidak ada pengaruhnya yang telah disampaikan oleh seorang pengurus DPW PKS DIY:

“..Tidak ada pengaruh, jadi yang sudah punya pendukung itu ya contohnya petahana dari yang sudah menjadi anggota dewan juga kita berikan kesempatan. Pengalaman politik kita juga tidak. Tidak secara khusus ya, membatasi itu enggak. Tapi nanti ada proses yang namanya uji bukti. Uji bukti itu kader bisa menilai si A si B ini punya aktivitas apa. Kalau aktivitasnya sebelumnya dibidang sosial ya boleh, kita juga tidak membatasi kemudian mereka tidak bisa masuk dalam dunia politik enggak gitu. Contoh: kita merekrut pengusaha, calon anggota DPR RI Ibu Linda. Ibu Linda merupakan seorang pengusaha..”

Dengan begitu bisa dipastikan bahwa dalam merekrut caleg perempuan, PKS tidak ada pengaruhnya dengan kualitas kandidat. PKS tidak membatasi bahwa caleg harus memiliki pengalaman politik. Karena dari latar belakang pengusahapun bisa menjadi caleg perempuan asalkan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dan dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PKS. Yang paling penting adalah latar belakang aktivitasnya di masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam aturan internal partai atau AD ART PKS tidak terdapat perbedaan dalam proses rekrutmen atau mekanisme kaderisasi oleh partai politik dalam memberikan sosialisasi atau pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pola rekrutmen untuk caleg laki-laki ataupun perempuan sifatnya terbuka. Dari eksternal bisa menjadi caleg asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PKS. Latar belakang sosial dari para caleg PKS seperti kelas pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan dan usia itu bervariasi. Sumberdaya dari para caleg PKS seperti waktu, keuangan, pengalaman politik, jaringan pendukung itu juga bervariasi. Motivasi caleg laki-laki ataupun caleg perempuan PKS adalah sifatnya normatif yaitu Berkontribusi Membangun Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi representasi dari sisi penawaran (*supply*) seperti budaya/agama, sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan macamnya bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi representasi dari sisi permintaan (*demand*) seperti sifat rezim, budaya politik, sistem pemilihan, kursi/kuota cadangan semuanya tidak ada pengaruh kecuali budaya politik yang menjadi pengaruh. Faktor penghambat keterwakilan perempuan: *Pertama*, faktor yang terjadi dalam diri individu perempuan itu sendiri yaitu kemauan. Tidak semua kader perempuan itu mempunyai minat di bidang politik khususnya menjadi calon anggota legislatif. *Kedua*, faktor budaya di masyarakat yang masih kurang percaya terhadap perempuan. Faktor pendorong perempuan untuk ikut serta dalam politik karena tumbuhnya kesadaran dalam diri mereka untuk memperjuangkan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Al Barry, M.Dahlan. 1994. Surabaya: Kamus Ilmiah Populer. *Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Waki, Ali. 2002. *Menelusuri Akar Konflik Elit Lokal di Madura*. Tesis S2/Polokad. UGM
- Erawan, I Ketut Putra, Riswanda Imawan dkk. 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian; Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia*.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusnardi dan Bintang R.saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suryadi, Budi. 2005. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoid.
- Muchamad, Zaenuri. *Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial*. FISIPOL UMY.
- Amal, Dr.Ichlasul. 1988. *Teori-Teori Mukhtahir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Sumber Skripsi :

- Hud, Djuwarti. 2008. *Analisis Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30% Di Lembaga Legislatif 2004 (Studi Kasus DPD Partai Golkar Provinsi DIY)*
- Sari, Dwi Marinda. 2012. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPC PDIP Kota Yogyakarta Periode Tahun 2010-2015*

Sumber Jurnal :

- Pippa Norris, Joni Lovenduski. 1993. If Only More Candidates Came Forward: Supply-Side Explanation of Candidate Selection in Britain. *British Journal of Political Science*, Vol.23, No.3. Juli.
- Purwaningsih, Titin. 2015. Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, Vol.1. No.1 Agustus

- Halder, Nomita. 2004. Female Representation In Parliament: A Case Study From Bangladesh. *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1 June.
- Susi Susanti dan Adelita Lubis. 2015. Partisipasi Politik Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (*Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*)
- Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso, Budi Santoso. 2014. Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta
- Andari, Pradita Tyas Putri. 2014. Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahter (PKS) Dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Grobogan